

**SKRIPSI**

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA WONOREJO TIMUR KECAMATAN  
MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURHIDAYATI**

**E051181011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA WONOREJO TIMUR KECAMATAN**  
**MANGKUTANA KABUPATEN LIWU TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHIDAYATI**

E051 181 011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas  
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Hj. Rabina Yurus, M.Si  
NIP. 19601123 19860320 001

  
Rahmatullah Jafar, S.IP, M.Si  
NIP.197770513 200312 1002

Mengetahui  
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA WONOREJO TIMUR KECAMATAN  
MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dipersiapkan dan di susun oleh

**NURHIDAYATI**

**E051 181 011**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi  
pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 7 Juni 2022**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua	: Prof. Dr.Hj Rabina Yunus, M.Si	(  )
Sekretaris	: Rahmatullah Jafar, S.IP, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	(  )
Pembimbing Utama	: Prof. Dr.Hj Rabina Yunus, M.Si	(  )
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah Jafar, S.IP, M.Si	(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhidayati

Nim : E051 181 011

Judul Skripsi : "KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WONOREJO  
TIMUR KECAMATAN MANGUTANA KBUPATEN LUWU  
TIMUR"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Juni 2022



Nurhidayati

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakaatu*, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhinga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua

orang tua penulis yakni, Ibunda Mesiani dan Ayahanda Waluyo atas segala perjuangan mendidik, membesarkan penulis, sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, serta Kepala Desa Wonorejo Timur yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan. Terima kasih atas nilai nilai kehidupan yang senantiasa di berikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa,M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Desa Wonorejo Timur beserta masyarakat Desa Wonorejo Timur.
9. Terima kasih kepada saudara: Hasmita Sari.B, Nur Wihdah Tajuddin, Femi Nur Islami, Nurnaningsih, Dini Purwa Ningrum yang

telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

10. Terima kasih untuk teman teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan Eleftheria 2018, Hasmita, wihdah ,Ainun, Nunu, Amel, Ayuni, Nur Wahidah, Salmiati, Nisha, Wahyudi, Syifa, Mutia, Sila, Fanny, Prisil, Erika , Sekar, Yudi, Tuti, Sri, Devi, Enny, Kiki, Nuna, Nini, Fattur, Aldi, Sofyan dan Femmy Nur Islami Atas kebersamaan dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju. Kesabaran atas apapun yang saya lakukan telah membantu mengembangkan saya menjadi seperti saya hari ini. Tak akan ada kata selamat tinggal untuk persaudaraan tiada akhir.

11. Kepada teman teman kuliah kerja nyata (KKN) Luwu Timur 01 Gelombang 107 : Mansur, Sulfikar, Dinda, Armila, Fertis, Mita, Resky, Ayuni, Wayan, Dewi, Kyrgizt, Desi, Afni, Gita, Mutmainnah, Ida, Afdhal, Sri, Niluh, Yudi. Terkhususnya untuk teman teman Posko 4 : Catur, Selfa, Rika , dan Hikma Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman selama proses pelaksanaan KKN di

Kabupaten Luwu Timur. Semoga tetap diberi kesehatan dan waktu tetap sudi untuk mempertemukan.

12. Terakhir, Teruntuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan hingga detik ini. Terima kasih telah kuat bertahan dengan kerasnya kehidupan. Terima kasih agar tidak pernah menyerah walau sering merasa kalah. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, Terima kasih sudah mau bangkit lagi walaupun rasanya sulit, tapi saya selalu yakin bahwa saya selalu bisa melewatinya. Just don't give up , everything its gonna be fine!.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KESLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Kepemimpinan.....	9
2.1.1. Definisi kepemimpinan .....	9
2.1.2. Gaya kepemimpinan.....	11
2.1.3. Fungsi kepemimpinan .....	13
2.1.4. Kepemimpinan Kepala Desa.....	14
2.2. Kajian Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	17
2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	20
2.2.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat .....	22
2.2.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.2.5. Faktor faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.3. Kerangka berpikir .....	26

<b>BAB III</b> .....	29
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	29
3.1. Jenis penelitian .....	29
3.2. Waktu dan Lokasi penelitian.....	29
3.3. Fokus Penelitian .....	30
3.4. Sumber data.....	31
3.5. Teknik pengumpulan data.....	32
3.6. Teknik Analisa Data.....	33
<b>BAB IV</b> .....	35
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur.....	35
4.1.1. Sejarah Kabupaten Luwu Timur .....	35
4.1.2. Geografi dan Administrasi Wilayah .....	41
4.1.3. Demografi.....	45
4.1.4. Topografi .....	47
4.1.5. Sosial dan Ekonomi .....	50
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Mangkutana.....	52
4.2.1. Sejarah Kecamatan .....	52
4.2.2. Keadaan Geografis dan Administrasi Wilayah .....	54
4.2.3. Jumlah Penduduk .....	56
4.2.4. Sosial dan Budaya.....	57
4.3. Gambaran Umum Desa Wonorejo Timur .....	60
4.3.1. Sejarah Desa Wonorejo Timur.....	60
4.3.2. Keadaan Geografis Desa Wonorejo Timur .....	64
4.3.3. Demografi Desa Wonorejo Timur .....	65
4.3.4. Keadaan Ekonomi.....	70
4.3.5. Sarana dan Prasarana Desa.....	71
4.4. Gambaran Umum Pemerintah Desa Wonorejo Timur.....	72
4.4.1. Kondisi Pemerintahan Desa Wonorejo Timur .....	72
4.4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonorejo Timur.....	72
4.4.3. Visi dan Misi Pemerintah Desa Wonorejo Timur.....	76

4.5. Program – Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur ....	79
4.5.1. Pemberdayaan sub bidang Pertanian dan perikanan .....	85
4.5.2. Pemberdayaan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur .....	87
4.5.3. Pemberdayaan Sub Bidang Perempuan perlindungan anak & keluarga .....	89
4.5.4. Pemberdayaan Sub Bidang Dukungan Penanaman modal Perdagangan & Perindustrian .....	90
4.6. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur .....	96
4.6.1. Kepemimpinan Kepala Desa dalam hal mengambil keputusan .....	99
4.6.2. Kepemimpinan Kepala Desa dalam hal Memotivasi .....	101
4.6.3. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Hal Menyelasaikan Konflik .....	104
4.7. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur .....	112
4.7.1. Faktor Pendorong Pemberdayaan Desa Wonorejo Timur.....	112
4.7.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Desa Wonorejo Timur .....	117
<b>BAB V .....</b>	<b>123</b>
<b>KESIMPULAN &amp; SARAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur .....	42
Tabel 2. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan jenis kelamin .....	46
Tabel 3. Topografi Wilayah Kabupaten Luwu Timur .....	48
Tabel 4. Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Luwu Timur .....	49
Tabel 5. Topografi Wilayah Kecamatan Mangkutana .....	55
Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan desa .....	57
Tabel 7. Gambaran alur sejarah Desa Wonorejo Timur .....	61
Tabel 8. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	65
Tabel 9. Jumlah penduduk berdasarkan agama .....	66
Tabel 10. Jumlah penduduk sesuai pembagian dusun .....	66
Tabel 11. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	67
Tabel 12. Jumlah penduduk berdasarkan umur .....	68
Tabel 13. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian .....	69
Tabel 14. Jumlah penduduk berdasarkan status .....	70
Tabel 15. Kepemilikan ternak .....	70
Tabel 16. Sarana & Prasarana desa .....	71
Tabel 17. Nama – nama kepala dusun Wonorejo Timur .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 2.Peta Administrasi wilayah Kabupaten Luwu Timur .....	45
Gambar 3.Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur .....	48
Gambar 4.Peta kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur .....	49
Gambar 5.Peta Administrsi wilayah Kecamatan Mangkutana .....	54
Gambar 6.Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonorejo Timur .....	73
Gambar 7.Struktur Organissi BPD Desa Wonorejo Timur .....	76

## **ABSTRAK**

**NURHIDAYATI**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi Dengan Judul: **Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur** (Dibimbing Oleh Prof.Dr.Hj Rabina Yunus.M,Si. Dan Rahmatullah, S.Ip.M,Si.)

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Wonorejo Timur sumber daya manusia nya masih perlu perhatian dari Pemerintah Desa. Di tandai dengan masih kurangnya pelatihan dan pemberdayaan bagi Masyarakat. Berdasarkan data dari RPJMDes Desa Wonorejo Timur merupakan desa yang penduduknya memiliki kualitas pendidikan rendah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan, Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana metode ini menggambarkan dan mendeskripsikan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur melalui program – program Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa Wonorejo Timur pada tahun 2019 sudah berjalan sesuai dengan RKP desa namun pada tahun 2020 – 2021 pemberdayaan Desa Wonorejo Timur terhambat dikarenakan adanya pandemi covid 19. Sedangkan kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa Wonorejo Timur melakukan kerja sama dan mengawasi setiap program yang sedang berjalan. Faktor yang menjadi pendukung komunikasi, sumber daya alam dan disposisi sedangkan yang menghambat pandemi covid, partisipasi, dan pola pikir masyarakat.

**Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pemberdayaan**

## **ABSTRACT**

**NURHIDAYATI**, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title: **Leadership of the Village Head in Empowering the People of East Wonorejo Village, Mangkutana Distrik East Luwu Regency** (supervised by Prof. Dr. Hj Rabbina Yunus, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si).

The phenomenon in the field shows that what is happening in East Wonorejo Village is that human resources still need attention from the Village Government. It is marked by the lack of training and empowerment for the community. Based on data from the RPJMDes, East Wonorejo Village is a village whose population has a low quality of education. This can affect the progress and quality of human resources.

This study aims to describe, know and analyze how the village head's leadership in empowering the people of East Wonorejo Village. The type of research used is descriptive qualitative. Where this method describes and describes with the aim of explaining the Village Head Leadership in Community Empowerment of East Wonorejo Village through Community Empowerment programs.

The implementation of the empowerment activities of the East Wonorejo Village in 2019 has been running in accordance with the village RKP but in 2020-2021 the empowerment of the East Wonorejo Village is hampered due to the covid 19 pandemic. Meanwhile, the leadership of the Village Head in implementing the empowerment activities of the East Wonorejo village cooperates and oversees every program which is running. Factors that support communication, natural resources and disposition, while those that hinder the covid pandemic are participation, and people's mindsets.

**Keywords : Leadership, Village Head, Empowerment**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sumber daya manusia pada masa ini menjadi titik pusat perhatian organisasi baik pemerintah maupun swasta. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu manusia itu sendiri sebagai unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena tanpa ketiadaan manusia organisasi tidak akan bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Kedua perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan manusia yang menjadikan kehidupan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya agar mampu mengantisipasi semua perkembangan. Maka di butuhkan seorang pemimpin yang mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk daerahnya.

Kepemimpinan kepala desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya mencakup bagaimana kepala desa mampu mengkoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin kepala desa bukan hanya dituntut mengelola perangkat yang ada di dalam struktur desa. Namun juga untuk seluruh masyarakat desa.

Proses kepemimpinan dan proses pemberdayaan masyarakat desa yaitu salah satu kewenangan kepala desa dalam kaitannya dalam

pembagian urusan pemerintah dalam PP No.38 Tahun 2007 pasal 2 Ayat 4 No. 21, yakni pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat banyak sekali. Banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang di tujukan untuk membuat masyarakat lebih kreatif, lebih mandiri, dan lebih berdaya dengan tujuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat terutama masyarakat desa. Dari banyaknya upaya tersebut, kepala desa memegang peran penting dalam kaitannya dengan keberhasilan proses pemberdayaan. Termasuk kaitannya dalam usaha untuk menggali dan mengeksplorasi potensi yang di miliki desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Wonorejo Timur.

Pemberdayaan itu sendiri adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169).

Dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat melibatkan beberapa faktor seperti yang di dukung oleh Pendapat Edward III,G,C,(2007:66-69) bahwa faktor faktor yang berpengaruh terhadap

program pemberdayaan Masyarakat adalah komunikasi(communication), Sumber daya (resource),disposisi (dispotition), dan struktur birokrasi.Masyarakat diminta untuk mengkomunikasikan apa apa yang menjadi kebutuhannya. Selain itu sebaik apapun program yang di tawarkan jika proses komunikasinya tidak lancar dapat berakibat terhambatnya proses pemberdayaan yang di lakukan. Faktor lain yang menjadi pendukung ialah Sumber daya Manusia dengan asumsi yg di miliki serta nilai nilai yang dianut oleh para stakeholder.

Desa Wonorejo Timur merupakan Desa Pemekaran dari Desa Induk yaitu Wonorejo Kecamatan Mangkutana. Dasar hukum pembentukannya yaitu Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Asana, Desa Kalatiri, Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau, Desa Rinjai, Desa Tarengge Timur, Desa Madani Kecamatan Wotu, Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni, Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana, Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena, Desa Watangpanua, Desa Wanasari Kecamatan Angkona, Desa Matompi Kecamatan Towuti. Luas Desa Wonorejo Timur sekitar 2,73 km, sebagian lahannya digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Desa Wonorejo terdiri dari 4 Dusun, yakni: Dsn Sido Rejo, Dsn Sido Makmur, Dsn Sido Tepung 01, dan Dsn Sido Tepung 02.

Pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan

pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Namun, pada kenyataannya fenomena di lapangan menunjukkan bahwa yang terjadi di Desa Wonorejo Timur sumber daya manusia nya masih perlu perhatian dari Pemerintah Desa. Di tandai dengan masih kurangnya pelatihan dan pemberdayaan bagi Masyarakat. Berdasarkan data dari RPJMDes Desa Wonorejo Timur merupakan desa yang penduduknya memiliki kualitas pendidikan rendah, karena rata rata lulusan pendidikan yang ada di desa Wonorejo Timur adalah lulusan SD sebanyak 590 jiwa, SMP 390 jiwa, dan SMA 501 jiwa dan lulusan Sarjana 181 jiwa dari total jumlah penduduk 2.538 jiwa. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan tabel permasalahan mengenai pelatihan pemberdayaan sumber daya manusia di Desa Wonorejo Timur:

NO.	PERMASALAHAN
1.	kurangnya pelatihan dan penyuluhan bagi kelompok tani
2.	Kurangnya kapasitas Perangkat desa dan Petugas linmas tidak memiliki dasar hukum penertiban karna belum adanya perdes/perkades
3.	SDM RT Rendah perlu adanya peningkatan kapasitas RT
4.	SDM PKK rendah , Kinerja kurang memadai
5.	SDM BPD kurang pelatihan
6.	SDM kader kurang aktif dan kurang memadai
7.	SDM guru mengaji kurang
8.	Kurangnya pelatihan usaha bagi masyarakat

Untuk pelatihan dan penyuluhan kelompok tani terdiri dari 1 gapoktan, Pelatihan dan peningkatan kapasitas LINMAS terdiri dari 3 orang, Pelatihan bAagi RT terdiri dari 2 orang, Peningkatan kapasitas untuk ibu PKK terdiri dari 30 orang, Peningkatan kapasitas BPD terdiri dari 2 orang, Pelatihan kader di desa terdiri dari 11 orang, Pelatihan bagi guru mengaji terdiri dari 3 orang, serta pelatihan bagi SDM kelompok usaha terdiri dari 10 orang.

Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat desa tentunya di pengaruhi oleh pemimpinnya. Peranan atasan sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasi. Dari merekalah muncul gagasan gagasan baru dan inovatif dalam pengembangan instansi. Namun demikian bawahan juga memiliki peran yang tidak kalah penting yaitu untuk menjalankan dan melaksanakan gagasan kepemimpinan yang tertuang dalam setiap keputusan. Baik atau tidaknya bawahan melaksanakan tugas, tergantung dari bagaimana seorang pemimpin memberikan dorongan dan motivasi mempengaruhi para bawahannya agar melakukan berbagai tindakan sesuai dengan yang di harapkan.

Mengingat kepemimpinan begitu penting sebagai faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi atau usaha. Sama halnya dengan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa Wonorejo Timur dituntut dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Orientasi pemberdayaan masyarakat khususnya Masyarakat desa masih belum menyentuh secara maksimal. Salah satu penyebabnya karena kapasitas penyelenggaraan di Desa masih rendah selain itu juga belum

optimalnya aspek kelembagaan Sumber Daya Manusia, ini terbukti dari adanya data statistik menunjukkan bahwa masih minimnya sumber daya manusia di Desa Wonorejo serta tingkat pendidikan yang masih Rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini sangat penting di lakukan untuk melihat sejauh mana kepemimpinan desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa. Adapaun judul penelitian yaitu **“KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WONOREJO TIMUR KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada permasalahan di atas yang telah di uraikan oleh peneliti di latar belakang, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur?
3. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

### **1.4. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk Progam Studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana.
2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kepemimpinan kepala desa

dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo  
Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ialah uraian tentang teori-teori konsep yang akan di pergunakan di dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada. Dalam mengkaji dan membahas masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang di angkat.

#### **2.1. Kepemimpinan**

##### **2.1.1. Definisi kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan terjemahan dari bahasa inggris leadership yang berasal dari kata leader. Kata leader muncul tahun 1300-an sedangkan kata leadership muncul belakangan sekitar tahun 1700-an. Kepemimpinan menurut Hasibuan (2007:170) “ proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang akan di kerjakan serta bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Menurut Anoraga yang di kutip oleh Sutisna (2011:214) berpendapat hampir sama dengan yang di kemukakan oleh Hasibuan bahwa Kepemimpinan adalah “kemampuan mempengaruhi pihak lain

melalui komunikasi, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin itu”.

Dengan demikian kepemimpinan memiliki pemahaman dalam dua arti yaitu pertama untuk menggerakkan dan mempengaruhi pihak lain mengikuti pimpinan yang memiliki sosok dapat dipercaya, tegas, berani, untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan sebuah sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Ada berbagai macam faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan otoritas, dan bujukan. Kedua Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan terhadap para anggota kelompok. Definisi mengandung tiga implikasi penting yaitu:

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda dalam mempengaruhi perilaku pengikutnya dengan berbagai cara

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi dan memberikan contoh oleh seorang pemimpin kepada pengikutnya dalam usahanya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Kepemimpinan sesungguhnya adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang kompak dan bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, dan memberikan inspirasi dalam mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan dalam prosesnya melibatkan tiga hal yakni, pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu.

### **2.1.2. Gaya kepemimpinan**

Dalam kegiatan menggerakkan dan memberikan motivasi kepada bawahannya, terdapat berbagai cara yang telah dilakukan oleh seorang pemimpin yakni dengan melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Berikut merupakan definisi gaya kepemimpinan dari para ahli di antaranya:

a. Menurut House Robbins yang dikutip oleh Donni dan Suwatno (2011:158) gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- Kepemimpinan direktif, kepemimpinan ini membuat bawahan tahu apa yang diinginkan oleh pemimpin dari mereka, menjadwalkan kerja untuk dilakukan, dan memberikan bimbingan khusus mengenai bagaimana cara menyelesaikan tugas yang baik dan benar.

- Kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan ini bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan para bawahan.
- Kepemimpinan Partisipatif, kepemimpinan ini berkonsultasi dengan bawahan menggunakan saran mereka sebelum mengambil keputusan.
- Kepemimpinan berorientasi pada prestasi, kepemimpinan ini menetapkan kepada tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi pada tingkat tinggi mereka.

b. Menurut Hasibuan (2011), terdapat tiga gaya kepemimpinan yaitu:

- Kepemimpinan otoriter, adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau jika pemimpin tersebut menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dari kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- Kepemimpinan Partisipatif, adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan secara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, Menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memberikan motivasi kepada para bawahan agar merasa ikut memiliki instansi atau organisasi.

- Kepemimpinan Delegatif, adalah seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap, dengan demikian bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli dengan bagaimana cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya di serahkan kepada bawahannya.

### **2.1.3. Fungsi kepemimpinan**

Adanya kepemimpinan memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dari fungsinya, sehingga ada beberapa fungsi dari kepemimpinan untuk mencapai hal tersebut, sebagai berikut:

1. Memiliki visi mutu terpadu bagi institusi
2. Memiliki komitmen yang jelas terhadap proses peningkatan mutu
3. Mengkomunikasikan pesan mutu
4. Memastikan kebutuhan pelanggan menjadi pusat kebijakan praktek dan institusi
5. Mengarahkan perkembangan bawahan
6. Berhati hati dengan tidak menyalahkan orang lain saat persoalan muncul tanpa bukti bukti nyata
7. Memimpin inovasi dalam institusi

8. Mampu memastikan bahwa struktur organisasi secara jelas telah mendefinisikan tanggung jawab dan mampu mempersiapkan delegasi dengan tepat
9. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan rintangan, baik yang bersifat organisasional atau cultural
10. Membangun tim yang efektif
11. Mengembangkan mekanisme yang tepat untuk mengawasi dan mengevaluasi kesuksesan

#### **2.1.4. Kepemimpinan Kepala Desa**

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Taliziduhu Ndraha (2003:226) mengemukakan bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang hubungannya satu dengan yang lain, yaitu konsep yang bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau kepala desa yang berkepemimpinan di hadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Ia harus memilih peran sebagai kepala atau pemimpin. Dilihat dari

sudut itu saat orang melakukan peran, ia harus mempertimbangkan peran lainnya.

Kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kepemimpinan kepala desa sangat dibutuhkan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu tugas kepala desa yakni urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat.

Salah satu tugas seorang kepala desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 adalah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.

- f. Membina perekonomian desa. pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang,

Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa

- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

## **2.2. Kajian Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan atau Pemberkuasaan (empowerment) menurut Suharto (2009:57) secara konseptual berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Kekuasaan sering kali di anggap sebagai kemampuan seseorang khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan yang ada di dalam diri mereka sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari hari dan mereka memiliki kebebasan.berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memilih daya, kekuatan dan kemampuan, atau proses

pemberian daya, kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 7).

Terkait definisi Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja adalah: “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169).

Kartasmita (1996: 45) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah: “Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering and sustainable”. Konsep ini

lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu” (Kartasasmita, 1996: 45)

Selain kutipan diatas, terdapat definisi pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat adalah: “Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan” (Sumodiningrat, 1999: 32)

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Vindyandika (2004: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

### **2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan menurut Suharto ( 2009:60) menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat, khususnya, kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal, (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternalnya (misalnya di tindas oleh struktur yang tidak adil ). Pemberdayaan pada Hakekatnya merupakan perubahan sosial masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat, perlu di ubah ke arah sikap dan tindakan yang positif dan kreatif, dan mendorong masyarakat untuk mandiri dan tidak menjadi ketergantungan sehingga menjadi masyarakat yang berdaya.

Pelaksanaan proses dan pencapaian pemberdayaan masyarakat menurut Suharto dalam Huraerah (2011:102-103) dapat di capai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi yang tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah. Pemberdayaan harus di arahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan, pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan , memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

### **2.2.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Suharto mengemukakan pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian dari kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (2006:5).

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka

atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

#### **2.2.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sumodiningrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2002:179).

Menurut Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

- a. **Penyadaran** Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (self help)
- b. **Pengkapasitasan** Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity bulding, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.
- c. **Pendayaan** Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

#### **2.2.5. Faktor faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat**

Edward III,G.C. mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat yaitu:

komunikasi (communication), Sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan oleh komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/ mendua). Ketidajelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah diterapkan. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Selain itu, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kebutuhan untuk profesionalisme sumber daya manusia dan aktivitas yang mereka lakukan dapat memberikan kontribusi pada suksesnya usaha dan dapat memberikan daya saing perusahaan/organisasi atas produktivitas, kualitas dan jasa pelayanan. (Robert, 2001:1). Olehnya itu, pembudayaan pendidikan guna

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan (Tjokroamidjoyo, 2004:46).

Selanjutnya, yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program adalah disposisi (disposition). Disposisi atau sikap dan pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga suatu kebijakan publik. Hubbeis, et.al. (2008:14) mengatakan bahwa cara seseorang pemimpin dalam memberdayakan bawahannya adalah pemimpin mempercayai bawahannya untuk bisa melakukan lebih banyak karena potensi yang dimilikinya. Menurut Mortimer (2002:178) mengatakan cara mendorong orang atau bawahan adalah jangan rendahkan seorang bawahan, jangan kritik bawahan di depan umum, beri perhatian penuh pada bawahan, dan selalu terbuka pada hal-hal kecil. Makmur (2009:175-176) kelangsungan hidup sebuah organisasi berkaitan erat dengan proses perilaku manusianya yang dapat memperkuat roh atau jiwa bagi kedinamisan sebuah struktur organisasi.

### **2.3. Kerangka berpikir**

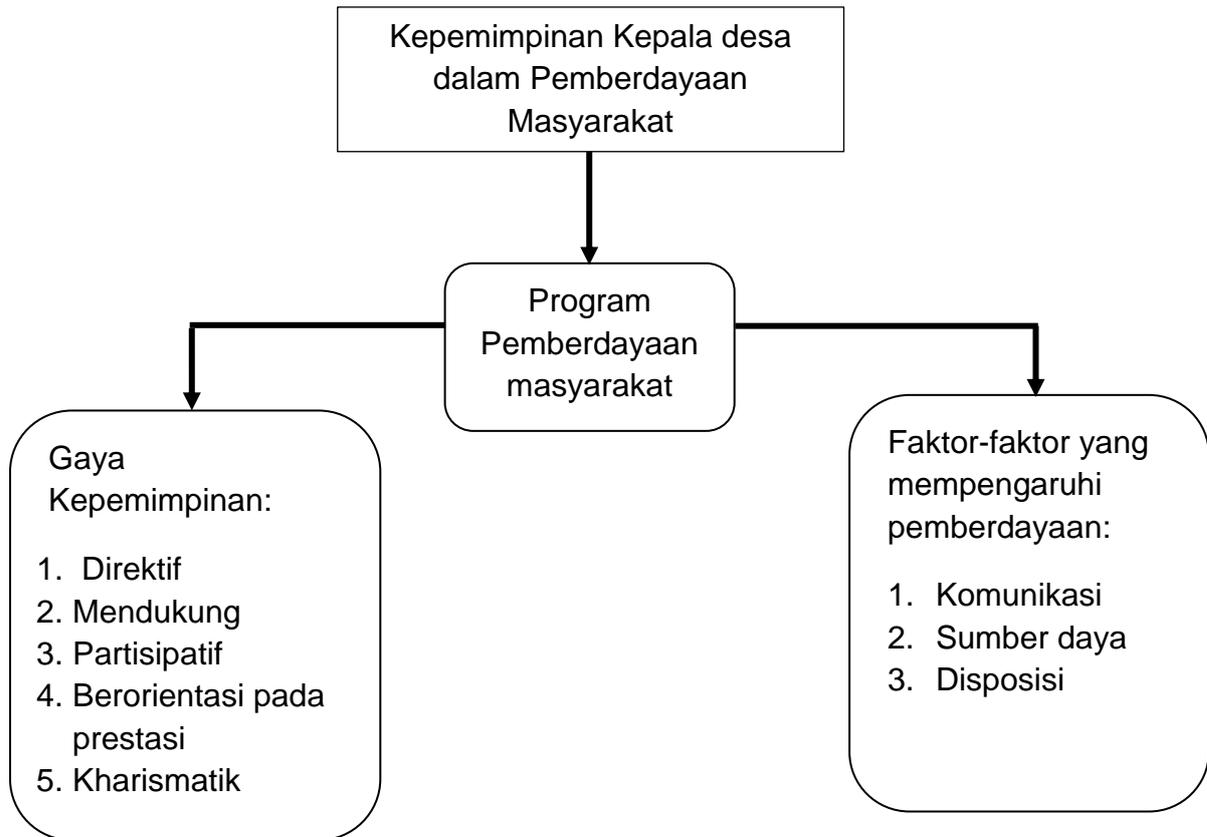
Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012). Berikut ini akan dijelaskan mengenai kerangka konsep yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini.

Kepala desa yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemimpin formal memiliki peranan yang strategis dalam membawa masyarakat ke

arah tujuan pembangunan desa yang dicita-citakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 yakni kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat. Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat.

**Gambar 1: Bagian Kerangka Konsep**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, dimana data datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya. Atau sebagaimana mestinya dengan tidak merubah simbol simbol.atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau proses menjangkau dan mendapatkan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang pada obyeknya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana metode ini menggambarkan dan mendeskripsikan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonorejo Timur melalui program – program Pemberdayaan Masyarakat.

#### **3.2. Waktu dan Lokasi penelitian**

Berdasarkan dari Judul penelitian maka Lokasi yang di gunakan sebagai objek penelitian adalah Pemerintahan Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena Desa Wonorejo Timur merupakan desa terpadat penduduknya dari 11 desa di kecamatan mangkutana, dengan kepadatan sekitar 371 orang perkilometer persegi. Dengan kepadatan penduduk tersebut sumber daya manusianya masih kurang perhatian dari